

BAB III

PROFIL ORGANISASI WANITA TAMANSISWA

3.1 Perjalanan Organisasi Wanita Tamansiswa

Keberadaan Wanita Tamansiswa sebelum berwujud sebagai suatu organisasi yang sempurna lengkap dengan segala peralatannya, telah dirasakan kebermanfaatannya sejak lahirnya Tamansiswa.¹ Menurut Piagam Yayasan pasal I, Badan Hukum berbentuk Yayasan ini bernama: “Persatuan Perguruan Tamansiswa berpusat di Yogyakarta” dan berkedudukan di Yogyakarta.² Dalam lingkungan Tamansiswa terdapat organisasi Wanita Tamansiswa yang merupakan suatu wadah yang menghimpun segenap potensi wanita yang terdapat dalam lingkungan Persatuan Tamansiswa. Organisasi ini lahir pada 3 Juli 1922 di Mataram-Yogyakarta. Pada tahun-tahun pertama organisasi ini dipimpin langsung oleh Nyi Hadjar Dewantara dan Nyi Soetatmo Soerjokoesoemo. Meskipun organisasi Wanita Tamansiswa bersifat khusus karena hanya terdapat dalam lingkungan Persatuan Tamansiswa, namun dalam gerak langkahnya tidak kalah dengan organisasi wanita pada umumnya yang selalu ikut aktif memperjuangkan peningkatan derajat dan martabat kaum wanita. Selain itu Wanita Tamansiswa selalu membaktikan dirinya kepada kepentingan masa dan bangsanya³

¹ Nyi Moedjono Probopranowo. *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Tamansiswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*. Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa. 1992. Hlm 5

² Hariyadi. *Pendidikan Ketamansiswaan Buku Pegangan Pamong bagian: Taman Madya/Taman Karya Madya*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 1977. Hlm 34

³ Darsiti Soeratman. *Dari Ki dan Nyi Hadjar Dewantara Sampai Pergerakan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa. 1986. Hlm 63-64

Wanita Tamansiswa juga bukan merupakan organisasi masa yang dapat menghimpun anggota wanita dalam jumlah yang banyak karena keterbatasannya. Kuantitas anggota tidak dapat dikejar, melainkan yang diusahakan yaitu kualitas. Terbatas disini maksudnya dalam hal keanggotaannya yang hanya terdiri dari pamong wanita dan isteri pamong. Maka dilihat dari segi kuantitatif, keanggotaan Wanita Tamansiswa relatif sedikit. Adapun ajaran hidup Tamansiswa seperti kesederhanaan, berfikir secara praktis, serta selalu berpedoman kepada sistem hidup atas kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa merdeka merupakan senjata ampuh bagi Wanita Tamansiswa untuk tetap berjuang, supaya apa yang dicita-citakan masyarakat seperti tertib, damai dan bahagia dapat terwujud.⁴ Seiring dengan perkembangannya, persyaratan untuk menjadi anggota Wanita Tamansiswa diperlonggar. Selain itu Wanita Tamansiswa masih membuka pintu bagi wanita-wanita lain yang berminat sebagai anggota keluarga. Adapun yang dapat diterima sebagai anggota keluarga adalah wanita yang menyatakan setuju dengan asas dan tujuan Wanita Tamansiswa serta tidak pernah menyalahinya.⁵

Sebelum *Vrouwenraad* dengan tegas dibentuk, beberapa orang ibu diantaranya Nyi Hadjar Dewantara, Nyi Soetatmo Soerjokoesoemo, Nyi Soedarminta, Nyi Soenarjati Soekemi, Ni Soerip dan Ni Istri Kartini secara diam-diam telah bekerja dalam *Vrouwenraad* atau Majelis Wanita. Dalam hal ini berarti Majelis Wanita secara nyata tergantung dari adanya peran pamong wanita. Ditinjau

⁴ Nyi Moedjono Probopranowo. *Suara Wanita Tamansiswa dalam Mengenang Harijadi Wanita Tamansiswa*. Yogyakarta: Asuhan Badan Wanita Tamansiswa. 1980. Hlm 8

⁵ Darsiti Soeratman. *op.cit.* hlm 64

dari segi perorangan atau kekeluargaan pendidikan dan pengajaran di Tamansiswa tersebut, dilakukan bersama-sama dengan Nyi Hadjar Dewantara. Ditinjau dari segi organisasi para pamong wanitalah sejak saat itu sudah terlibat dalam menjalankan pengaruh keperempuanannya dalam mendidik para siswanya. Dengan demikian bahwa pada hakekatnya ibu-ibu atau wanita-wanita di lingkungan Tamansiswa telah berperan sejak Tamansiswa dilahirkan. Sebelum diresmikannya sebagai sebuah organisasi, pada waktu itu Wanita Tamansiswa dipersonifikasikan dalam diri Nyi Hadjar Dewantara dan para pamong wanita.⁶

Para wanita telah merasakan bahwa mereka wajib membantu Tamansiswa dalam segala usahanya. Namun pada saat itu kelompok wanita ini bukanlah merupakan suatu organisasi dalam suatu arti kata yang sebenarnya. Secara tidak resmi mereka menjalankan fungsi sebagai yang dijalankan oleh Wanita Tamansiswa sekarang ini. Mereka bertindak sebagai Majelis Wanita (*Vrouwenraad*) dalam keluarga suci Tamansiswa.⁷ Madjelis Wanita ini dianggap suatu hal yang sangat penting untuk menyuarakan keinginan kaum perempuan. Sebenarnya sudah dirasakan betapa perlunya dalam tubuh Tamansiswa mempunyai *Vrouwenraad* yang dapat memberikan penerangan dan memberikan tenaga tentang perkara keperempuanan, misalnya seputar pendidikan anak perempuan, pengajaran kepandaian istri, pemeliharaan gadis, pelanggaran adab dan kesopanan oleh atau terhadap perempuan, masalah kesucian dan peradaban, hal kesucian tingkah laku, kesusilaan pakaian perempuan, hal cerita dan bacaan yang baik bagi anak

⁶ Nyi Moedjono Probopranowo. *op.cit.* hlm 32

⁷ Darsiti Soeratman. *op.cit.* hlm 65

perempuan dan sebagainya. Oleh karena kepentingan tersebut, sudah lama pula dalam praktiknya Tamansiswa selalu meminta penerangan kepada anggota-anggota perempuan, jika Tamansiswa harus menetapkan suatu sikap yang berhubungan dengan masalah keperempuanan.⁸

Suatu hal yang sangat bijaksana dan yang sangat kita hargai, bahwa sejak berdirinya Tamansiswa tidak pernah meninggalkan suara wanita. Menyadari pentingnya adanya suatu organisasi wanita dalam tubuh persatuan sebagai wadah kegiatannya dan mutlaknya pimpinan pusat yang mengatur, mengkoordinasi dan membimbingnya, maka atas prakarsa Nyi Sri Mangunsarkoro seorang pamong wanita, dibentuklah pimpinan pusat yang dinamakan “Badan Pusat Wanita Tamansiswa.” Peristiwa tersebut terjadi pada salah satu rapat yang dilaksanakan di Gedung Asrama Wismo Rini di Mataram pada 31 Maret 1931 dalam rangka Konferensi Jawa Tengah. Badan ini kemudian disahkan dalam Rapat Besar Persatuan Tamansiswa pada tahun 1932 yang dipimpin oleh Ki Pronowidigdo.⁹

Pada Konferensi besar tersebut, *Vrouwenraad* dapat dimasukkan dalam *Burgelijke Stand* (catatan sipil) sebagai badan absah dalam Tamansiswa. Badan Wanita seharusnya menjadi sebagian dari Majelis Luhur yang sejajar dengan Badan Paniteran, Badan Bendahara, Badan Perusahaan, Badan Pengajaran, Badan Kesehatan, Badan Pemeliharaan Anggota yang Sudah Tua (*Ouderdomszorg*) dan

⁸ K.H Dewantara. *Wanita Tamansiswa Vrouwenraad dalam Tamansiswa*. Majalah Pusara Jilid I. No 3-4-5. 1931. Hlm 21

⁹ Darsiti Soeratman. *op.cit.* hlm 65-66

lain-lain.¹⁰ Tentu saja maksud dan tujuan Wanita Tamansiswa tidak boleh menyalahi hakikat Tamansiswa yang hingga kini dapat diketahui dalam Azas, Sendi, Peraturan Besar dan Adat dari Tamansiswa. Dalam Madjelis Luhur Wanita Tamansiswa ini diwakili oleh Nyi Hadjar Dewantara yang sudah terpilih dalam Rapat Besar Wanita Tamansiswa pada 31 Desember 1932. Dalam organisasi Wanita Tamansiswa ini kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya Wanita Tamansiswa ini adalah suatu aturan khusus untuk keperluan seputar masalah keperempuanan.¹¹

Sejak Tamansiswa dilahirkan, orang yang pertama melaksanakan dan memperhatikan masalah wanita di Tamansiswa adalah Nyi Hadjar Dewantara beserta ibu-ibu lainnya. Tidak hanya terbatas pada lingkungan Tamansiswa saja, tetapi Nyi Hadjar Dewantara juga merupakan seorang tokoh pemrakarsa diselenggarakannya Kongres Perempuan I.¹² Wanita Tamansiswa ini merupakan organisasi wanita perintis, karena lahir sebelum Kongres Perempuan Indonesia I. Dilaksanakannya Kongres ini merupakan tonggak awal perjuangan wanita yang berlangsung dari tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Djodipoeran Yogyakarta. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh organisasi wanita Indonesia dalam Kongres ini berawal dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang sering terlihat dan dirasakan wanita, seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang, pandangan bahwa wanita lebih

¹⁰ K.H Dewantara. *op.cit.* hlm 22

¹¹ S. Djojoprajitno. *Wanita Tamansiswa*. Majalah Pusara Jilid III. No 4-5. 1933. Hlm 73

¹² Nyi Moedjono Probopranowo. *op.cit* hlm 7

rendah dibandingkan kaum laki-laki dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut, menggerakkan wanita untuk berjuang memperbaiki nasibnya.¹³ Perlu diingat bahwa organisasi Wanita Tamansiswa bukan didirikan atas rekayasa pemimpin-pemimpinnya untuk tujuan politik atau tujuan idealisme tertentu. Organisasi ini lahir berdasarkan kodrat-iradatnya alam dan zaman, yaitu berdasarkan kepentingan segenap kaum wanita anggota Persatuan Tamansiswa.¹⁴

Secara kronologis, Wanita Tamansiswa telah melewati tahun-tahun yang berarti sebagai bukti perjuangannya dalam masalah kewanitaan. Dimulai dari tahun 1922 yang merupakan tahun pertama, dimana perjalanannya seirama dengan Tamansiswa. Maka ibu-ibu pamong dan istri pamong Tamansiswa, satu diantaranya adalah Nyi Hadjar Dewantara sejak berdirinya perguruan Tamansiswa telah berfungsi sebagai pendidik, pengamat dan penanggungjawab mengenai masalah keperempuanan, baik secara perorangan maupun kelompok.¹⁵ Tahun 1923 Tamansiswa membentuk *instituutraad* (Majelis Cabang) yang kemudian menjadi Majelis Luhur bertujuan mengatur cabang-cabang perguruan Tamansiswa di luar Yogyakarta. Selain Majelis Luhur, dibentuk pula Majelis Wanita (*Vrouwenraad*) yang mewakili guru wanita dan isteri guru. Pada 1928, Nyi Hadjar Dewantara dari Wanita Tamansiswa bersama dengan Ny. Sukonto dari Wanito Utomo dan N. Suyatin dari Puteri Indonesia memprakarsai diselenggarakannya Kongres

¹³ Nyi Moedjono Probopranowo. *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Tamansiswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*. Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa. 1992. Hlm 38-39

¹⁴ *Ibid*, hlm 28

¹⁵ Nyi Moedjono Probopranowo. *Ibid*, hlm 5

Perempuan Indonesia I. Adapun organisasi wanita yang termasuk dalam penyelenggara KPI I diantaranya: Wanito Utomo, Wanita Tamansiswa, Aisyiyah, Wanita Katolik, Puteri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling dan Jong Java Dames Afdeling.¹⁶

Kongres tersebut bertujuan membentuk suatu lembaga untuk mempersatukan pergerakan wanita dalam usahanya mencapai kebebasan. Adapun putusan-putusan penting dalam Kongres ini diantaranya:¹⁷

1. Membentuk badan pemufakatan Perikatan Perempoean Indonesia atau PPI kemudian diubah namanya menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia atau PPII.
2. Mengadakan beasiswa untuk para gadis yang pandai di sekolah kejuruan. Pada tahun 1929 dalam Kongres PPII, beasiswa tersebut diberi nama Seri Derma yang berbentuk yayasan.
3. Mengadakan berbagai kursus seperti kesehatan, pemberantasan buta huruf, dan pemberantasan kawin di bawah umur.
4. Memajukan kepanduan untuk gadis.
5. Menyampaikan tiga buah mosi kepada pemerintah jajahan diantaranya: agar pemerintah menambah sekolah untuk para gadis, dalam hal perkawinan pemberian keterangan tentang taklik (janji dan syarat-syarat perceraian) diwajibkan serta membuat peraturan tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak piatu pegawai negeri bangsa Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 6

¹⁷ *Ibid.*, hlm 40

Tahun 1929 dalam pengurus PPI (Perikatan Perempoean Indonesia) yang merupakan badan federasi dibentuk sesudah KPI I yang kemudian berganti nama menjadi PPII (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) duduk sebagai penulis I semula Ni St. Sukaptinah, kemudian Ni Sunaryati dan Nyi Hadjar Dewantara menjabat sebagai komisaris kemudian pembantu. Dalam panitia Kongres PPII yang diadakan pada 1930, dari kalangan Wanita Tamansiswa duduk Nyi Sri Mangunsarkoro sebagai Penulis I dan Ni Sukaptinah sebagai Pembantu. Tahun 1931, Wanita Tamansiswa resmi menjadi badan kewanitaan di lingkungan Tamansiswa atas putusan Konferensi Daerah Jawa Tengah yang dilaksanakan di Yogyakarta. Sebagai pengurus yang dipilih dalam konferensi diantaranya:¹⁸

Nyi Hadjar Dewantara	: Ketua
Ni Surip	: Panitera
Nyi Sudarminto	: Anggota
Nyi S. Sukemi	: Anggota
Nyi Sri Mangunsarkoro	: Wakil Pusat di Jawa Barat
Nyi Sudjarwo	: Wakil Pusat di Jawa Timur

Sesudah KPI I kesempatan belajar bagi wanita semakin luas dan berkembang ke bawah. Tujuan organisasi wanitapun semakin maju dan meningkat. Pada 1931 juga untuk pertama kalinya PPII mengirim dua orang utusannya untuk menghadiri konferensi Wanita Asia di Lahore India. Utusan tersebut diantaranya Ibu Roekmini Santosa (adik ibu Kartini) dan Ibu Soenardjati dari Wanita Tamansiswa. Pada 1932

¹⁸ *Ibid.*, hlm 6-7

PPII mengeluarkan maklumat yang berisi ajakan kepada semua organisasi wanita dan kaum ibu seluruh Indonesia untuk membantu Tamansiswa menentang adanya *Onderwijs Ordonnantie* dan *Wilde Scholen Ordonnantie* yang akan diberlakukan oleh pemerintah jajahan pada 1 Oktober 1932.¹⁹ *Ordonansi tersebut* merupakan usaha pemerintah Belanda dengan melumpuhkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. *Onderwijs Ordonnantie*²⁰ atau undang-undang sekolah dan *Wilde Scholen Ordonnantie*²¹ atau sekolah liar dituangkan dalam *staatsblad* tahun 1932 No. 494.

Akibatnya banyak dari pamong Tamansiswa yang terkena “larangan mengajar” dari pemerintah kolonial karena dianggap berbahaya. Larangan tersebut ditakutkan akan mengenai semua pamong, maka Ki Hadjar Dewantara menyerukan kepada wanita-wanita Tamansiswa untuk menjadi srikandi-srikandi dan sembodro-sembodro.²² Menurut Ki Hadjar Dewantara, sifat khusus yang dimiliki Wanita Tamansiswa diantaranya:

¹⁹ *Ibid.*, hlm 41

²⁰ Isi dari *Onderwijs Ordonnantie* yaitu memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh Negara. Guru-guru sekolah partikelir harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengajar. Selain itu dalam segi pelajaran harus sesuai dengan pelajaran sekolah negeri. Lihat: Ki Drs. R.B.S. Fudyartanta, dkk. *Buku Ketamansiswaan untuk Taman Madya, Taman Karya Madya, Taman Guru Muda Tamansiswa*. Yogyakarta: Majelis Luhur Tamansiswa. 1987. Hlm 19

²¹ Berdasarkan laporan pemerintah *Wilde Scholen Ordonnantie* merupakan sekolah-sekolah yang diadakan dirumah-rumah tahanan atau disebut juga sekolah liar. Awalnya Ordonansi Sekolah Liar ini dikenal dengan *Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs* (Ordonansi Pengawasan atas Pendidikan Swasta). Lihat: Langgeng Sulisty Budi. *Bersekolah di Tanah Pengasingan: Boven Digul, 1927-1943*. Jurnal Sejarah Citra Lekha. Vol 2 (2). 2017. Hlm 118

²² Nyi Moedjono Probopranowo. *op.cit.* hlm 8

1. Wanita Tamansiswa sebagai badan keluarga dalam Tamansiswa maka tidak boleh dicampuri oleh orang luar.
2. Wanita Tamansiswa yang berciri khas sebagai pemberi nasihat dan bersifat korektif.
3. Wanita Tamansiswa mengusahakan rapatnya dengan bergaul bersama ibu-ibu murid.
4. Wanita Tamansiswa harus di jaga keras jangan sampai kemasukan jiwa party politik (*partijgeest*).²³

Dengan adanya *Onderwijs Ordonnantie* dan *Wilde Scholen Ordonnantie*, maka Tamansiswa beserta badan kewanitaan dan badan lainnya menentang keras supaya ordonansi tersebut dihapuskan. Berkat usaha Tamansiswa dan Wanita Tamansiswa dalam menghimpun segenap pimpinan pergerakan rakyat, perjuangan tersebut berhasil menghapuskan kedua ordonansi tersebut yang kemudian digantikan dengan dikeluarkannya ordonansi baru.²⁴

Rapat Besar Tamansiswa yang pertama dilaksanakan pada tahun 1932. Sesuai dengan isi pada sambutan Ki Hadjar Dewantara pada Pembentukan Badan Wanita Tamansiswa, yaitu bahwa badan tersebut masih harus mendapatkan pengesahan dalam Rapat Besar Tamansiswa, maka dalam Rapat Besar tahun 1932 inilah mengesahkan Badan Wanita Tamansiswa tersebut. Selain membenahi organisasi serta melakukan tugas mengenai masalah kewanitaan juga secara aktif Wanita Tamansiswa mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan akan

²³ *Ibid*, hlm 9

²⁴ Ki Drs. R.BS. Fudyartanta, dkk. *op.cit.* hlm 19-20

dilangsungkannya Kongres Perempuan Indonesia II. Dalam kurun waktu 1932-1936 berdirilah cabang-cabang Wanita Tamansiswa. Hubungan organisatoris telah terjalin antara Badan Pusat Wanita Tamansiswa dengan cabang-cabangnya. Menjelang berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia II yaitu pada 1935, di dalamnya termasuk pembahasan mengenai masalah kewanitaan, seperti masalah pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh atau terhadap anggota Wanita Tamansiswa, masalah kesopanan serta masalah perkawinan antara guru dan murid. Apabila yang melanggar adalah pamong, berarti anggota keluarga Tamansiswa dan Badan Pusat Wanita Tamansiswa berkewajiban menyarankan permasalahannya kepada Majelis Luhur untuk ditindaklanjuti.²⁵

Kewajiban Wanita Tamansiswa dalam membantu segala usaha Tamansiswa, menyusun dirinya sebagai organisasi wanita dengan berpedoman pada Badan Batin berupa naskah resmi pada waktu berdirinya Wanita Tamansiswa yang disusun oleh Ki Hadjar Dewantara yang berdasarkan Peraturan Besar yang disahkan dalam Konferensi 20 April 1936 Pasal I Asas Wanita Tamansiswa terdiri atas 7 pasal sebagai berikut:²⁶

1. Kodrat iradatnya hidup manusia yang berwujud perempuan dan laki-laki, sungguhlah mengandung maksud akan kekalnya turunan, dalam hal mana orang laki-laki menjadi lajer atau tiang turunan dan orang perempuan menjadi pemangku turunan.

²⁵ Nyi Moedjono Probopranowo. *op.cit.* hlm 8

²⁶ *Ibid*, hlm 9-10

2. Dalam pangkal hidupnya perempuan dan laki-laki, hak dan harga mereka itu sama. Sedangkan perbedaan antara mereka hanya semata-mata mengenai perbedaan hidup lahir dan batin yang khusus untuk masing-masing.
3. Manusia sebagai makhluk yang insyaf akan hidup, wajib berusaha akan kekal dan baiknya turunan sesuai dengan kodrat alam, sebagai terbukti dari beberapa alamat yang dalam hakikatnya bermaksud mengekalkan dan memperbaiki turunan atau melawan segala perbuatan dan segala keadaan yang merintangai kekal dan baiknya turunan itu.
4. Segala syarat untuk mencapai kekal dan baiknya turunan, haruslah bermaksud memperteguhkan rasa kesucian dalam batinnya manusia dan memajukan ketertiban dalam hidupnya manusia bersama, seperti terkandung dalam syarat agama, adat dan hukum.
5. Menurut kodrat iradatnya hidup dan terbukti dari riwayat kemanusiaan zaman purbakala, maka amatlah besar pengaruhnya perempuan sebagai pemangku turunan atas bertumbuhnya rasa kesucian dan rasa ketertiban, sehingga pendidikan anak-anak atas pembangunan masyarakat tidak akan dapat sempurna, jika tidak mempergunakan pengaruh perempuan yang baik.
6. Dimana Tamansiswa mewujudkan dirinya sebagai keluarga besar yang suci, maka berhak dan berwajiblah kaum perempuan di dalam kalangan Tamansiswa selalu mempergunakan pengaruh keperempuanan yang menuju ke arah kesucian dan ketertiban dalam masyarakat Tamansiswa.
7. Oleh karena Wanita Tamansiswa adalah bagian dari badan Tamansiswa, maka segala syarat keperempuanan yang diadakan olehnya tidak boleh

menyalahi asas Tamansiswa dan harus sesuai dengan kebangsaan dalam maksudnya yang sejati, yaitu memperteguhkan adat kemanusiaan.

Pasal II Kewajiban dan Hak:²⁷

1. Kewajiban dan hak Wanita Tamansiswa yaitu mengamati, menasehati dan memperbaiki segala keperluan dalam kalangan Tamansiswa yang mengenai soal keperempuanan istimewa tentang kesucian dan ketertiban dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
2. Mempergunakan pengaruh keperempuanan yang menuju ke arah kesucian dalam masyarakat Tamansiswa.

Pasal III syarat-syarat memenuhi pasal I dan II:²⁸

- a. Menjaga keputrian.
- b. Mempertahankan keutamaan wanita.
- c. Menjaga kepentingan Tamansiswa yang mengenai urusan dapur jika ada keperluan.
- d. Harus memperingatkan jika terdapat tindakan yang merendahkan keputrian.
- e. Harus mengurus jika terdapat tindakan yang mengecewakan, kurang kesusilaan dan melanggar kesucian.
- f. Harus mengurus pelajaran dan pendidikan keperempuanan.
- g. Harus mengetahui keluar masuknya harta benda Tamansiswa.
- h. Harus selalu berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan terutama dalam keluarga Tamansiswa.

²⁷ *Ibid*, hlm 10

²⁸ *Ibid*, hlm 10-11

- i. Harus memperhatikan pendidikan dan pengajaran di Taman Keputrian dan Taman Anak dan lain-lain bagian pada umumnya.
- j. Harus memelihara hubungan dengan dunia perempuan di luar umumnya dan dunia pergerakan perempuan khususnya.
- k. Serta syarat-syarat lainnya yang dapat menyempurnakan Wanita Tamansiswa dan Tamansiswa.

3.2 Wanita Tamansiswa sebagai Organisasi dan Penggerak Wanita

Bagi sebuah lembaga yang berkecimpung dalam bidang sosial budaya, tidaklah mengherankan jika dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Masalah ini diantaranya masalah kewanitaan. Masalah kewanitaan ini bukan hanya masalah yang menyangkut emansipasi saja, tetapi justru masalah yang menjadi prinsip permasalahan seluruh bangsa yaitu masalah kelangsungan hidup suatu bangsa dan masalah perbaikan jenisnya.²⁹ Memikirkan kelangsungan hidup suatu bangsa dan perbaikan jenisnya, tidak mungkin melupakan peranan wanita. Sejak menginjak masa remajanya, dapat dilihat bahwa kondisi wanita baik dari segi biologis maupun dari kejiwaannya sudah mulai dihadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Sebagai seorang gadis remaja untuk pertama kali mendapatkan perasaan yang aneh. Perasaan tersebut mungkin dirasakan sebagai suatu teka-teki dan bahkan sebagai suatu tekanan. Jika seorang gadis pada masa remaja tidak mendapatkan bimbingan dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang

²⁹ Ki Soeratman. *Buku Peringatan 60 tahun Tamansiswa 1922-1982*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 1982. Hlm 236

dihadapinya, maka akan muncul tantangan berikutnya. Tantangan tersebut berupa bahaya terjerumus ke jurang ke nistaan.³⁰

Bila bahaya pertama dan kedua telah berhasil dilampaui, mengincar bahaya-bahaya berikutnya, bahaya yang menimpa nasib wanita. Maka yang menjadi masalah wanita berikutnya mungkin timbul di dunia perkawinan, di lingkungan keluarga, di dunia pekerjaan dan di masyarakat luas. Apabila masalah-masalah ini tidak mendapat penanganan secara serius, maka yang akan menjadi korban tidak hanya terbatas pada wanita, melainkan akan meluas pada kehidupan bangsa. Alasan ini menjadi alasan utama yang menggerakkan ibu-ibu di kalangan Tamansiswa untuk bergerak di bidang kewanitaan Tamansiswa. Selama perjalanannya, telah banyak peristiwa-peristiwa yang di tangani oleh Wanita Tamansiswa yang menyangkut hidup kekeluargaan dan khususnya yang menyinggung masalah kesucilaan atau kesucian di masyarakat Tamansiswa. Tugas inilah yang menjadi tugas utama Wanita Tamansiswa.³¹

Sebagai pergerakan wanita, maka Wanita Tamansiswa yang bernaung di bawah panji-panji dan bendera Tamansiswa, tidak akan ketinggalan dari gerak langkahnya Tamansiswa. Melalui pendidikan nasionalnya, Tamansiswa akan membawa rakyat Indonesia tidak hanya menjadi rakyat yang cerdas, tetapi juga membuat rakyat yang berjiwa merdeka dan membuat rakyat Indonesia yang

³⁰ Kenistaan yang dimaksud yaitu kenistaan menurut ukuran agama dan tata susila suatu bangsa. Contohnya perumpamaan istilah Jawa “*Aji Godong Garing*” yang memiliki arti daun yang sudah kering lebih bernilai yang ditujukan kepada seseorang yang kehilangan kegadisannya melalui jalan yang bertentangan dengan hukum agama dan tata susila. Lihat: *Ibid*

³¹ *Ibid*

berkebudayaan, berkepribadian Indonesia dan yang sanggup berdiri sendiri. Tentunya usaha yang besar ini tidak mungkin jika hanya dikerjakan sendirian. Maka Wanita Tamansiswa juga ikut serta dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.³² Anggota Wanita Tamansiswa sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota organisasi dan sebagai anggota masyarakat selalu berusaha mengikuti setiap perkembangan dalam lingkungannya.

Untuk menjalankan tugasnya, sejak semula memacu kepada kriteria yang universal berdasarkan pada asas-asasnya secara luas, dilaksanakan sesuai dengan tuntutan ilmu dan teknologi dalam perkembangan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan peran sertanya ke dalam masyarakat luas yang tepat guna, Wanita Tamansiswa secara sadar dan berencana telah menetapkan tujuannya sesuai yang tercantum dalam Purwaka Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Peraturan Besar inilah yang digunakan sebagai pedoman kerja maupun sebagai pembawa diri Wanita Tamansiswa dalam lingkungan masyarakat luas. Dalam Peraturan Besar selain tercantum susunan Badan Pusat Wanita Tamansiswa dilengkapi juga dengan bagian-bagian sebagai pelaksana langsung kegiatan Badan Organisasi yang terdiri dari bagian organisasi, pendidikan, kekeluargaan dan usaha.³³

Dalam bagian organisasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota, pengurus daerah dan cabang Wanita Tamansiswa oleh Badan Pusat dibekali bahan-bahan dasar dan makalah-makalah. Pada waktu-waktu

³² *Ibid*, hlm 237

³³ Nyi Moedjono Probopranowo. *op.cit.* hlm 23

tertentu makalah-makalah tersebut disampaikan sendiri oleh Badan Pusat atau Tim Penatar Pusat pada pertemuan tingkat daerah atau cabang Wanita Tamansiswa. Cara penyampaiannya dilakukan dengan beberapa metode, seperti diskusi, ceramah, penataran, kursus, seminar dan sebagainya. Dalam bagian pendidikan, Wanita Tamansiswa melakukan kegiatan rutin seperti kesenian (latihan karawitan), olahraga (latihan SKJ) dan menyelenggarakan perpustakaan. Dalam bagian kekeluargaan, beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya membantu Perguruan Tamansiswa, mengikuti berbagai kegiatan sosial, membantu anggota yang mendapatkan musibah, mengunjungi anggota yang uzur, melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan mengadakan rekreasi. Sementara dalam bagian usaha, kegiatannya berupa pencarian dana dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pencarian dana tersebut dilakukan dengan pinjaman langsung bagi seluruh anggota dengan jasa 5% dengan sistem angsuran. Sedangkan dalam jangka panjang pencarian dana diusahakan dengan membantu Badan Pusat Wanita Tamansiswa untuk menjual Buku Peraturan Besar Tamansiswa, Majalah Suara Wanita Tamansiswa dan perlengkapan sekolah.³⁴

Pada abad ke-20 di Indonesia telah berdiri berbagai perkumpulan wanita yang kebanyakan masih bersifat kedaerahan dan ada juga yang menjadi bagian wanita dari pergerakan rakyat. Seiring dengan perjuangan rakyat Indonesia, bangkitlah pula kesadaran nasional pada kaum wanita. Misalnya di Jakarta pada tahun 1912 berdiri organisasi Putri Merdiko atas prakarsa Budi Utomo. Adapun organisasi-

³⁴ *Ibid*, hlm 23-26

organisasi lokal yang kemudian berdiri di beberapa tempat di Jawa, misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hadi di Jepara (1915), Purborini di Tegal (1917), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920) dan sebagainya.³⁵ Setelah tahun 1920 jumlah organisasi wanita bertambah banyak. Hal tersebut memberikan perhatian besar pada kedudukan wanita, karena wanita sebagai pendidik pertama putra dan putrinya dan memegang peranan yang penting dalam penyebaran cita-citanya. Maka pada tahun-tahun berikutnya berdirilah berbagai organisasi wanita baik secara struktural yang jelas menjadi bagian wanita dari suatu organisasi maupun secara idiil berafiliasi dengan organisasi lain.³⁶ Organisasi-organisasi tersebut misalnya: Wanito Utomo (1921), Wanita Tamansiswa (1922), Wanita Katolik (1924), Jong Java Meisjeskring, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling (1925), Ina Tuni (1927), dan Puteri Indonesia (1927). Setiap organisasi wanita tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang sekedar berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan memberi bekal kepada seluruh anggotanya untuk meningkatkan urusan kerumahtanggaan. Selain itu ada juga yang mempunyai fungsi jangkauan yang lebih jauh yaitu mencita-citakan peningkatan kedudukan wanita dalam masyarakat, ada yang dengan tegas secara langsung aktif di dunia politik.³⁷

³⁵ Ki Soeratman. *op.cit.* hlm 237

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm 238

Dari penjelasan tersebut, telah jelas bahwa perkembangan organisasi-organisasi wanita sebelum tahun 1928 termasuk pula kelahiran Wanita Tamansiswa. Wanita Tamansiswa ini semula menjadi bagian wanita dari Tamansiswa, tetapi kemudian membentuk diri sebagai organisasi wanita yang otonom dengan tetap berdiri di bawah naungan Tamansiswa dan terikat kepada dasar dan tujuan Tamansiswa, serta mewajibkan diri membantu Tamansiswa dalam segala usahanya. Organisasi Wanita Tamansiswa tidak menyimpang dari dasar, asas dan tujuan Tamansiswa. Di luar lingkungan Tamansiswa, Wanita Tamansiswa berada dalam deretan organisasi-organisasi wanita yang mendambakan akan perbaikan kedudukan sosial kaum wanita dan yang mencita-citakan perbaikan nasib bangsa Indonesia. Seberapa jauh peranan Wanita Tamansiswa dapat dilihat mulai dari susunan personalia Kongres Perempuan Indonesia I sampai dengan susunan pengurus PPPI, Wanita Tamansiswa mewakilkan Nyi Hadjar Dewantara duduk di dalamnya. Berhubungan dengan keputusan Kongres lain, Wanita Tamansiswa mendapat tugas sebagai anggota redaksi surat kabar yang akan diterbitkan. Selain Nyi Hadjar Dewantara yang berperan dalam kepengurusan Kongres, kepengurusan PPPI dan pada peristiwa-peristiwa berikutnya, ibu-ibu lainnya dari Wanita Tamansiswa juga ikut serta sekalipun tidak resmi mewakilinya, antara lain ibu Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, ibu Sunaryati Sukemi dan ibu Sri Mangunsarkoro.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm 239

Di samping permasalahan internal organisasi, seperti mengenai AD/ART, struktur serta kepengurusan organisasi, di dalam kongres PPPI memutuskan:³⁹

- A. Masalah yang berhubungan dengan perkawinan:
 - 1. Mengirimkan kepada pemerintah agar mengeluarkan Undang-Undang yang melarang pergundikan.
 - 2. Mencegah perkawinan bagi anak-anak dan menyadarkan kaum wanita akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan.
 - 3. Menanamkan pengertian kesucian perkawinan kepada pemuda-pemudi.
 - 4. Memberikan pencerahan tentang maksud dan tujuan perkawinan di berbagai tempat yang terjadi banyak perceraian.
- B. Masalah yang berhubungan dengan perburuhan:
 - 1. Mempelajari seputar masalah perburuhan perempuan.
 - 2. Mengadakan kantor penyuluhan perburuhan.
- C. Masalah yang berhubungan dengan kesehatan: melakukan penyelidikan dan memberi laporan tentang *hygiene* dalam kampung-kampung dan jumlah kematian bayi.
- D. Masalah yang berhubungan dengan politik dan hubungan luar negeri:
 - 1. Berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk mempertahankan watak kebangsaan Indonesia dan mencari hubungan baik di dalam dan di luar negeri.

³⁹ *Ibid*, hlm 239-240

2. Mengirimkan keputusan ke *All Asian Women Conference* yang dilaksanakan di Lahore pada tahun 1931. Salah satu utusannya adalah ibu Sunaryati Sukemi selaku anggota Wanita Tamansiswa.
 3. Mempelajari tentang hak pilih wanita.
- E. Masalah yang berhubungan dengan bidang sosial:
1. Memajukan gerakan “Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak”.
 2. Mendirikan biro informasi untuk kaum wanita dan anak-anak.
 3. Memperlihatkan persoalan perawatan orang miskin.

3.3 Rancangan Wanita Tamansiswa

3.3.1 Azas Wanita Tamansiswa

1. Kodrat iradatnya hidup manusia yang berwujud perempuan dan laki-laki, sungguhlah mengandung maksud akan kekalnya turunan dalam hal mana orang laki-laki menjadi ladger atau tiang turunan dan orang perempuan menjadi pemangku turunan.
2. Dalam pangkal hidupnya perempuan dan laki-laki itu hak dan harga mereka sama, sedangkan segala perbedaan antara mereka semata-mata hanya mengenai perbedaan hidup lahir dan batin yang khusus untuk masing-masing.
3. Manusia sebagai makhluk yang harus insyaf akan hidupnya, wajiblah berusaha akan kekal dan baiknya turunan sesuai dengan kemauan kodrat-alam, sebagai terbukti dari beberapa alam yang dalam hakikatnya bermaksud mengekalkan dan memperbaiki turunan atau melawan segala perbuatan dan keadaan yang merintang kekal dan baiknya turunan itu.

4. Segala syarat untuk mencapai kekal dan baiknya turunan, haruslah bermaksud memperteguhkan rasa kesucian dalam batinnya manusia dan memajukan ketertiban dalam hidupnya manusia bersama, seperti terkandung dalam syarat-syarat agama, adat dan hukum.
5. Menurut kodrat dan iradatnya hidup dan terbukti dari riwayat kemanusiaan mulai zaman purbakala, maka amat bersabarlah pengaruhnya perempuan sebagai pemangku turunan atas bertumbuhnya rasa kesucian dan rasa ketertiban, sehingga tidak akan pendidikan anak-anak atas pembangunan masyarakat akan dapat sempurna, jika tidak mempergunakan pengaruh perempuan yang baik.
6. Dimana Tamansiswa mewujudkan dirinya sebagai keluarga besar yang suci, maka berhak dan berwajiblah kaum perempuan di dalam kalangan Tamansiswa selalu menggunakan pengaruh keperempuanan yang menuju kearah kesucian dan keteriban di dalam masyarakat Tamansiswa.
7. Oleh karena Wanita Tamansiswa itu adalah sebagian dari badan Tamansiswa, maka segala syarat keperempuanan yang diadakan olehnya, tidak boleh menyalahi Azas Tamansiswa dan harus sesuai dengan adat kebangsaan dalam maksudnya yang sejati, yaitu memperteguhkan adab kemanusiaan.⁴⁰

3.3.2 Azas-azas Tamansiswa

Seperti yang kita ketahui bahwa berdirinya organisasi Wanita Tamansiswa ini berada dalam naungan Tamansiswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara.

⁴⁰ Panitia Badan Pusat Wanita Tamansiswa. *Wanita-Taman-Siswa Azas (Praeadvies Badan Poesat Harian dari Wanita-Taman-Siswa)*. Majalah Pusara Jilid III. No 10. 1933. Hlm 151

Tentu saja maksud dan tujuan Wanita Tamansiswa tidak boleh menyalahi hakikat Tamansiswa yang tercantum dalam Azas-azas Tamansiswa. Adapun Azas-azas Tamansiswa diantaranya sebagai berikut.

1. Asas pertama: Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan mengingati tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum (*maatschappelijke saamhorigheid*).⁴¹
2. Asas kedua: Dalam sistem ini, maka pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya.⁴²
3. Asas ketiga: Tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada di dalam kebingungan.⁴³
4. Asas keempat: Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil dari rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya.⁴⁴

⁴¹ Asas pertama ini menentukan kedudukan manusia sebagai individu sekaligus juga makhluk sosial. Lihat: Ki Soeratman. *Ketamansiswaan I: Pemahaman dan Penghayatan Asas-asas Tamansiswa 1922*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 1982. Hlm 7

⁴² Asas kedua ini menegaskan tentang tujuan pendidikan Tamansiswa adalah untuk mendidik agar anak didik menjadi manusia yang berjiwa merdeka. Lihat: *Ibid*, hlm 11

⁴³ Asas ketiga ini bukan meramalkan segala zaman yang akan datang, melainkan menunjukkan bahwa pada setiap saat, manusia akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, maka telitilah dan berhati-hatilah dalam memilih. Lihat: *Ibid*, hlm 12

⁴⁴ Asas keempat menunjukkan asas demokrasi atau asas kerakyatan yang dianut oleh Tamansiswa. Maka pendidikan harus diberikan kepada masyarakat dalam jumlah yang besar, karena jika hanya sebagian rakyat kecil saja yang terdidik, maka kaum terpelajar yang terbatas itulah kurang faedahnya bagi pembinaan bangsa. Lihat: *Ibid*, hlm 13

5. Asas kelima: Untuk dapat berusaha menurut asas yang merdeka dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri.⁴⁵
6. Asas keenam: Oleh karena kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka haruslah segala kebutuhan dari usaha kita itu dipikul sendiri dengan uang pendapatan biasa.⁴⁶
7. Asas ketujuh: Dengan tidak terikat lahir atau batin, serta dengan suci hati, berniatlah kita berdekatan dengan sang anak.⁴⁷

3.3.3 Peraturan Besar Wanita Tamansiswa Bagian Pertama

PERATURAN DASAR

BAB 1

Umum

Pasal 1

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Wanita Tamansiswa.
2. Wanita Tamansiswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 bersamaan dengan kelahiran Tamansiswa, untuk waktu yang tidak ditentukan.

⁴⁵ Asas kelima menunjukkan konsekuensi dari orang yang ingin hidup bebas dan merdeka. Kebebasan ini bukan berarti bebas yang tanpa batas atau merdeka yang tanpa tanggungjawab, melainkan kemerdekaan manusia yang memiliki keterbatasan kodrati dan sosial sebagai mahluk Tuhan. Lihat: *Ibid*, hlm 14

⁴⁶ Asas keenam menunjukkan pengelolaan dana yang diperlukan bagi setiap usaha, maka syarat untuk dapat tetap kuat dengan berdasarkan kepada kekuatan sendiri, maka segala keperluan kita harus didukung oleh pendapatan nyata sesuai dengan kemampuan sendiri. Lihat: *Ibid*, hlm 14-15

⁴⁷ Asas ketujuh merupakan pengabdian seorang pamong yang dikemukakan dalam sumpah jabatan dan sekaligus ditunjukkan kemuliaan profesi guru melalui dunia pendidikan hendaknya merupakan pilihan secara suka rela yang dilandasi oleh "*sepi ing pamrih*" dan rasa penuh tanggungjawab. Pendekatannya kepada sang anak dilandasi oleh rasa cinta kasih, bukan karena tujuan lain. Lihat: *Ibid*, hlm 15

3. Wanita Tamansiswa berpusat dan bertempat kedudukan di Yogyakarta, bersama-sama dengan tempat kedudukan Persatuan Tamansiswa.

Pasal 2

Kedudukan Organisasi

Wanita Tamansiswa adalah organisasi di dalam lingkungan Persatuan Tamansiswa.

Pasal 3

Asas

Asas Wanita Tamansiswa adalah Pancasila.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Maksud

Wanita Tamansiswa didirikan dengan maksud memberi wadah kepada para wanita khususnya anggota dan keluarga serta pecinta Tamansiswa, untuk menyumbangkan darma baktinya kepada Tamansiswa, masyarakat dan negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tujuan

Wanita Tamansiswa bertujuan mewujudkan masyarakat tertib damai dan salam bahagia, sesuai dengan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 6

Ciri khas dan sifat

1. Wanita Tamansiswa berciri khas Pancadarma.
2. Wanita Tamansiswa bersifat kekeluargaan, yang berarti paduan demokrasi dan kebijaksanaan pimpinan.

Pasal 7

Kewajiban

1. Wanita Tamansiswa wajib membantu Tamansiswa dalam segala usahanya:
 - a. Di bidang kebudayaan dan pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan kewanitaan dan kesucian dalam masyarakat Tamansiswa.
 - b. Penyebarluasan ajaran hidup Tamansiswa.
2. Wanita Tamansiswa wajib bekerjasama dengan organisasi lain di bidang kebudayaan dan pendidikan nasional.
3. Wanita Tamansiswa wajib berperan serta dalam pembangunan Nasional.

Pasal 8

Usaha

Untuk mencapai tujuannya Wanita Tamansiswa berusaha:

1. Memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Tamansiswa.

2. Mengadakan hubungan dengan dunia pergerakan wanita di luar Tamansiswa dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Wanita Tamansiswa.